

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 telah memberikan berbagai pengaruh di segala sektor kehidupan. Namun, pada praktiknya kebijakan pembatasan pergerakan sosial telah mengurangi mobilitas masyarakat sehingga membatasi kegiatan perekonomian. Kebijakan pembatasan pergerakan sosial ternyata berdampak signifikan pada cara bertransaksi bahkan gaya hidup masyarakat (Huda dan Qibtiyah, 2022) Keadaan ini memaksa pelaku usaha untuk menyesuaikan keadaan. Banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang melakukan perubahan dengan berbagai cara agar dapat terus bertahan tetapi sebagian besar dari UMKM tersebut terpaksa menutup usahanya (Pinem, 2020).

Berdasarkan laporan Kementerian Koperasi dan UMKM dalam Rosita (2020), tercatat 1.785 koperasi dan 167.713 pelaku UMKM terdampak negatif Pandemi Covid-19. Sektor makanan, minuman, dan pariwisata menjadi sektor yang paling terdampak Pandemi seperti turunnya penjualan, kekurangan modal, dan terhambatnya pendistribusian produk. Hal ini menyebabkan 39,9 persen UMKM membatasi penyediaan barang selama pembatasan sosial berskala besar. Selain itu, 16,1 persen pelaku UMKM memutuskan pengurangan pegawai (Rosita, 2020).

UMKM sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang terpuruk selama Pandemi. Berdasarkan pemaparan Ketua *Bali Tourism Board (BTB)* Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali, Ida Bagus Agung Partha Adnyana menyebutkan bahwa setiap bulannya terjadi 40.000 pembatalan hotel dengan

kerugian Rp 1 triliun. Kelesuan ini memberikan efek yang berkesinambungan terhadap sektor UMKM. Berdasarkan data Pusat Pengetahuan Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E LIPI) melaporkan bahwa 27 persen UMKM makanan dan minuman terkena dampak dari penurunan pariwisata sebesar 1,77 persen, usaha menengah 0,07 persen, kerajinan kayu dan rotan sebesar 17,03 persen sementara itu konsumsi rumah tangga terkoreksi antara 0,5 persen hingga 0,8 persen (Katadata 2020).

Di Indonesia UMKM memiliki kontribusi maupun peranan yang cukup besar diantaranya yaitu perluasan kesempatan penyerapan tenaga kerja. UMKM juga merupakan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk menjalani kegiatan ekonomi produktif. Disamping itu UMKM merupakan jenis usaha yang memiliki peran penting dalam peningkatan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) suatu negara khususnya di Indonesia dengan menghadapi era industri 4.0. Terdapat beberapa klasifikasi UMKM berdasarkan aset dan omzet yang dimilikinya. Usaha mikro adalah jenis usaha yang memiliki kekayaan maksimal Rp 50 juta dengan hasil penjualan atau omzet sebesar maksimal Rp 300 juta pertahun. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan dari Rp 50 juta sampai Rp 500 juta dengan omzet sebesar Rp 300 juta sampai Rp 2,5 Milyar pertahun sedangkan usaha menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan sebesar Rp 500 juta sampai Rp 10 Milyar dengan hasil penjualan atau omzet Rp 2,5 Milyar sampai Rp 50 Milyar. Dalam hal ini, pandemi telah memberikan dampak negatif yang signifikan terjadi terhadap perekonomian di Indonesia. Penjualan menurun, permodalan, pesanan menurun, kesulitan bahan baku, dan kredit macet. Ekonomi tiba-tiba mengalami resesi dalam sekejap (Sari *et al*, 2021).

Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat tergantung pada ketahanan UMKM saat menghadapi krisis. Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingrabatun memperkirakan omzet UMKM di sektor nonkuliner turun 30 - 35 persen sejak Covid-19 penyebabnya adalah penjualan produk ini mengandalkan tatap muka atau pertemuan antara penjual dan pembeli secara fisik. UMKM yang menjual produk non-kuliner menasar wisatawan asing sebagai pasar (Amri, 2020).

Kota Semarang yang berkedudukan sebagai Ibu Kota Jawa Tengah menjadi salah satu kota yang sangat terdampak pandemi terutama dalam aspek perekonomian. Kota Semarang yang didominasi oleh sektor perdagangan dan pariwisata sejatinya memiliki berbagai UMKM yang mampu berperan aktif menopang pertumbuhan ekonomi daerah, namun saat pandemi Covid-19 justru bidang ini yang paling terdampak. Saat ini tercatat ada 17.044 UMKM berdasarkan sebaran di setiap kecamatan. Adapun rincian detailnya dapat dilihat pada tabel.1.1 berikut:

Tabel 1. 1. Daftar UMKM di Kota Semarang 2020

No.	Kecamatan	Jumlah
1.	Tugu	336
2.	Ngaliyan	691
3.	Mijen	557
4.	Gunugpati	559
5.	Banyumanik	933
6.	Tembalang	1.595
7.	Pedurungan	2.657
8.	Candisari	695

9.	Gajahmungkur	603
10.	Semarang Barat	1.388
11.	Semarang Tengah	1.304
12.	Semarang Timur	1.100
13.	Gayamsari	1.137
14.	Genuk	900
15.	Semarang Utara	1.676
16.	Semarang Selatan	833
Jumlah Total		17.044

(Sumber: Dinas Koperasi dan UM Kota Semarang 2022).

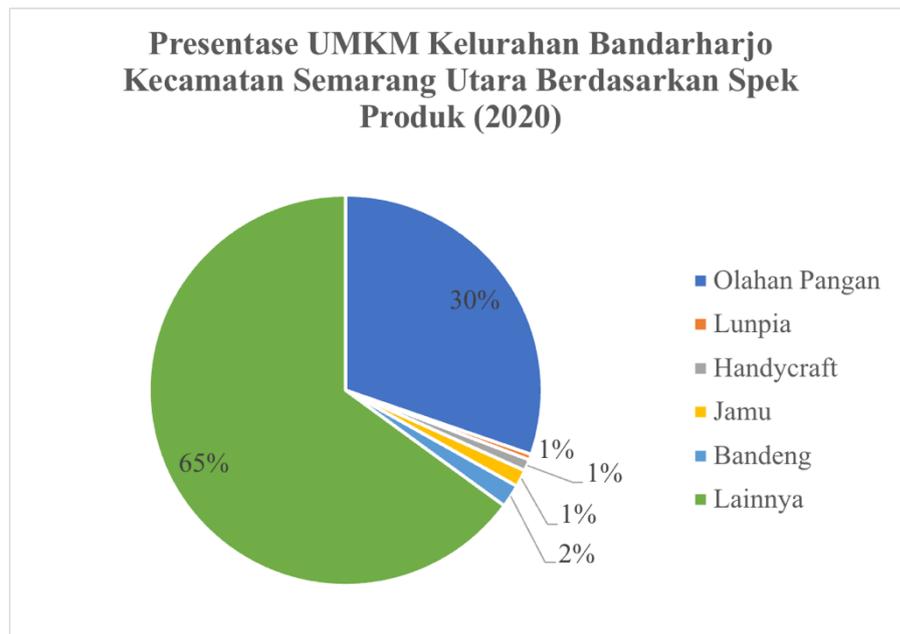
Berdasarkan tabel 1.1. dapat terlihat bahwa Kecamatan Pedurungan adalah kecamatan yang memiliki Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terbanyak di Kota Semarang yakni sebesar 2.657. Selanjutnya, urutan kedua adalah Kecamatan Semarang Utara sebesar 1.676 UKM. Sedangkan kecamatan yang memiliki UKM terendah adalah Kecamatan Tugu yaitu sebesar 603 UKM.

Salah satu pusat UMKM di Kota Semarang berada di Sentra UKM Keota Lama. Sentra UKM Kota Lama Semarang bernama *Semarang Creative Gallery* atau Galeri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang diresmikan oleh Wakil Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti pada tahun 2017. Sentra UKM Kota Lama Semarang dibangun oleh Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) Semarang. Produk UKM yang dapat dijual di sentra ini adalah produk unggulan yang telah terseleksi Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) (Antara Jateng 2017). Sampai saat ini, terdapat 56 UKM yang aktif berjualan di Sentra UKM Kota Lama Semarang terdiri dari UKM bidang fashion, logam, furniture, barang antik, dan kuliner. Sejak awal berdirinya sentra UKM Kota Lama

Semarang, Pemerintah Kota Semarang optimis galeri ini dapat menjadi sentra UKM unggulan yang menjadi daya tarik sehingga mendukung upaya pemerintah mewujudkan Kota Lama sebagai *World Heritage* UNESCO 2020 (Halo Semarang 2019).

Kota Lama Kota Semarang berada di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara. Saat ini, Kelurahan Bandarharjo telah memiliki 211 usaha mikro yang terbagi atas usaha olahan pangan, lunpia, *handycraft*, jamu, bandeng, dan lainnya. Usaha lainnya meliputi usaha fashion, laundry, toko grosir, dll. Presentase UMKM Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara dapat dilihat melalui diagram tersebut:

Gambar 1. 1. Gambar Presentase UMKM Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara Berdasarkan Spek Produk (2020)



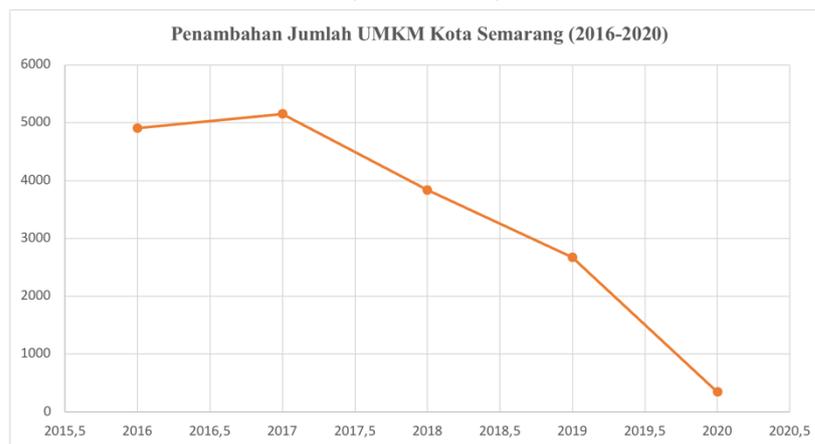
Sumber: Dinas Koperasi dan UM Kota Semarang, 2022

Akan tetapi, keberlanjutan UKM di Sentra UKM Kota Lama Semarang sedang mengalami masalah akibat penurunan wisatawan selama pandemi Covid-19. Dilansir dari Bisnis.com, Kepala Desa Sepakung Banyubiru selaku aktor

pengembangan wisata Kota Lama menyatakan bahwa terdapat penurunan jumlah kunjungan wisata 70-80 persen (Semarang Bisnis 2021). Hal ini menyebabkan UKM di Kota Lama mengalami permasalahan dalam permodalan, prospek usaha, bahan baku, dan tenaga kerja.

Kondisi UMKM Kota Semarang di tengah pandemi telah mengalami kelesuan. Hal ini dapat dilihat dari grafik penambahan UMKM Kota Semarang dari tahun 2016 sampai 2020. Pada tahun 2020, telah terjadi kemerosotan sebesar 87 persen padahal lima tahun terakhir selalu cenderung mengalami kenaikan sebesar 5 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui bagan dan grafik di bawah ini:

Gambar 1. 2. Grafik Penambahan UMKM Kota Semarang (2016-2020)



Sumber: Dinas Koperasi dan UM Kota Semarang, 2022.

Guna mengatasi permasalahan – permasalahan tersebut, pemerintah menetapkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang disebut sebagai program PEN. Program Pemulihan Ekonomi Nasional adalah rangkaian kegiatan pemulihan perekonomian untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dan menghadapi ancaman perekonomian yang dapat mengganggu stabilitas negara. Program ini diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha

Mikro. Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan program ini adalah dengan memberikan bantuan bagi pelaku usaha mikro, yaitu Bantuan Produktif Usaha Mikro (Permen 2020).

Bantuan Produktif Usaha Mikro diberikan kepada pelaku Usaha Mikro untuk menjalankan usaha di tengah krisis akibat pandemi Covid-19. Bantuan Produktif Usaha Mikro sudah berjalan selama dua tahun, yaitu pada tahun 2020 dan 2021. Bantuan Produktif Usaha Mikro tahun 2020 dilakukan dengan memberikan bantuan uang tunai kepada pelaku usaha mikro sebesar Rp 2.400.000,00 dengan kriteria tertentu. Target Bantuan Produktif Usaha Mikro 2020 ialah dapat disalurkan kepada 12 juta pelaku usaha (Kemenkop UKM 2021). Dinas Koperasi dan UM Kota Semarang telah memberikan usulan bantuan sebanyak 111.289 usulan dengan data sebagai berikut:

Tabel 1. 2. Tabel Usulan Penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro 2020

Mekanisme Usulan	Jumlah Usulan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jawa Tengah Jateng	17.654
Tahap I	15.535
Tahap II	77.100
Total	111.289

Sumber: Dinas Koperasi dan UM Kota Semarang, 2020).

Bantuan Produktif Usaha Mikro 2020 mendapatkan kritik karena mengalami berbagai kendala di lapangan, seperti kelengkapan data penerima, keterlambatan penyaluran, duplikasi penerima, penerima bantuan tidak terdaftar, dan penerima sulit ditemukan lokasinya (Ekonomi.bisnis, 2021).

Tahun 2021, Bantuan Produktif Usaha Mikro lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Covid-19 (Permen 2021). Bantuan Produktif Usaha Mikro 2021 ditargetkan mampu mengalokasikan Rp 12.800.000,00 per pelaku usaha mikro. Pengusulan penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro dilaksanakan sebanyak enam tahapan mulai dari bulan April sampai September. Dinas Koperasi dan UM Kota Semarang memberikan usulan Bantuan Produktif Usaha Mikro sebanyak 71.376 penerima bantuan dengan data sebagai berikut:

Tabel 1. 3. Jumlah Penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro 2021

Tahap	Jumlah Penerima	Tanggal
I	1.340	22 April 2021
II	1.365	21 Mei 2021
III	181	25 Juni 2021
IV	67.806	Juli 2021
V	525	10 Agustus 2021
VI	159	13 September 2021
Total	71.376	

(Sumber: Dinas Koperasi dan UM Kota Semarang, 2021).

Berdasarkan tabel 1.3. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang telah menyalurkan 71.376 bantuan usaha melalui enam tahapan. Jumlah penerima di setiap tahapan cenderung tidak stabil. Terlihat bahwa pada tahap keempat meningkat signifikan sebesar 67.625. Hal ini dikarenakan adanya penggunaan aplikasi *e*-BPUM yang membantu percepatan input data dari berbagai kelembagaan UMKM di Kota Semarang.

Subjek pada kebijakan ini adalah UMKM. UMKM menjadi salah satu pilar utama perekonomian, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 4 menegaskan bahwa UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga pemerintah harus melakukan berbagai upaya untuk terus mempertahankan eksistensinya (UUD NRI 1945). Peran pemerintah sangatlah dibutuhkan untuk memberikan stimulasi kepada para pelaku usaha yang berdasarkan peraturan yang berlaku dan terus mengevaluasi kebijakan yang berlangsung agar mendapatkan umpan yang terbaik (Natasya dan Hardiningsih 2021:142).

1.2. Rumusan Masalah

Paparan pada paragraf terdahulu telah dijelaskan bahwa implementasi dari bantuan produktif mikro yang dilaksanakan pada tahun 2020 dan 2021 masih mengalami beberapa kendala teknis. Hal ini tentunya menimbulkan permasalahan yang pada akhirnya akan membuat tujuan dari pemberian bantuan tersebut menjadi tidak tercapai. Berdasarkan bukti empiris tersebut, masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Bantuan Produktif Usaha Mikro tahun 2021 di Sentra UKM Kota Lama Kota Semarang?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis efektivitas Bantuan Produktif Usaha Mikro tahun 2021 di Sentra UKM Kota Lama Semarang.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan/manfaat teoretis yakni :

7. Untuk menambah wawasan pengetahuan yang dapat mengembangkan dan menyempurnakan konseptualisasi teori terkait implementasi kebijakan publik.
8. Untuk menjadi bahan rujukan bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji topik penelitian sejenis.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Tidak hanya memiliki kegunaan teoretis tetapi penelitian ini diharapkan juga memiliki kegunaan / manfaat praktis yakni :

1. Bagi peneliti, proses pelaksanaan dari penelitian ini dapat makin meningkatkan *soft skill* dalam membuat dan menulis karya ilmiah serta memperluas yang berguna untuk pengembangan karir peneliti di masa depan.
2. Bagi pemerintah, temuan penelitian ini dapat dijadikan referensi ataupun sebagai dasar pijakan dalam peningkatan pelayanan masyarakat melalui program evaluasi efektivitas kebijakan Bantuan Produktif Usaha Mikro.

1.5. Kerangka Teori

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, peneliti mengambil beberapa data dari penelitian terdahulu yang relevan membahas mengenai efektivitas kebijakan atau program. Terdapat penelitian efektivitas Jaring Pengaman Ekonomi (JPE), efektivitas pelaksanaan program pengembangan Usaha Mikro dan Menengah (UMKM), efektivitas program Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan efektivitas program pembinaan UMKM.

Tabel 1.4. Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Nama, dan Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Efektivitas Jaring Pengaman Ekonomi Dampak Covid-19 Bagi Usaha Mikro Makanan dan Minuman Olahan Kota Salatiga. Reindar Prastiwa Melania, dkk (2021).	Mengetahui bagaimana pengaruh pemberian JPE, dampak Covid-19, aset, dan jumlah tenaga kerja terhadap omzet usaha mikro makanan dan minuman olahan di Kota Salatiga.	Metode kuantitatif dengan analisis regresi berganda dan pendekatan <i>ordinary least square</i> (OLS)	Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberian JPE dampak Covid-19, aset, dan jumlah tenaga kerja memiliki pengaruh signifikan positif. Temuan dari studi ini membuktikan program JPE Covid-19 layak untuk dipertahankan dan dikembangkan.

2.	<p>Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda (Studi Pada Dinas Koperasi Dan Umkm Kota Samarinda). Euis Hasmita Putri (2017).</p>	<p>Mengetahui, mendeskripsikan efektivitas dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program pengembangan UMKM di Kota Samarinda pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda</p>	<p>Metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data wawancara dan observasi melalui pendekatan <i>purposive sampling</i>.</p>	<p>Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda memiliki peran penting dalam memberikan pelatihan, pemberdayaan, pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan kepada para pelaku UMKM. Untuk faktor penghambatnya yakni, minimnya dana atau biaya sehingga membatasi pengadaan kegiatan pelatihan, Sumber Daya Manusia yang belum memadai dalam melakukan kegiatan UMK, kemampuan teknik produksi dan manajemen terbatas, dan pemasaran yang relatif sulit.</p>
3.	<p>Efektivitas dan Dampak Program Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Pendapatan dan Kesempatan Kerja Usha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). I</p>	<p>Untuk mengetahui efektivitas dan dampak KUR terhadap Pendapatan dan Kesempatan Kerja UMKM di Kota Denpasar.</p>	<p>Metode kuantitatif dengan perhitungan statistik non parametrik Mc Nemar</p>	<p>Program bantuan KUR berdampak positif terhadap pendapatan dan kesempatan kerja UMKM di Kota Denpasar.</p>

	Gusti Agung Alit Semara Putra (2013).			
4.	Efektivitas Pembinaan Usaha Industri Kecil Olahan Pangan oleh Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi (Studi di Kecamatan Sigi Biromaru). Selfiawaty Fausiah (2016).	Mengetahui efektivitas pembinaan usaha industri kecil oleh Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi.	Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Penelitian menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> .	Pembinaan usaha industri kecil olahan pangan yang dilakukan melalui program pengembangan layanan, pelibatan masyarakat untuk mendorong kemampuan usaha, dan penciptaan kolaborasi belum berjalan dengan efektif.
5.	Efektivitas Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai. Ita Rosita, dkk (2020).	Untuk mengetahui Efektivitas Program Pemberdayaan UMKM dan Dampak Program Pemberdayaan UMKM terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai.	Deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> .	Efektifitas Program UMKM menjadi 5 indikator berbeda yaitu Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan, Perubahan nyata bahwa pelaksanaan program UMKM telah efektif dilaksanakan, namun masih harus ada perbaikan dan perkembangan

				<p>agar UMKM dapat meningkatkan hasil usahanya serta faktor penghambat dari pelaksanaan program tersebut adalah sosialisai yang masih harus diperbaiki serta masih kurangnya dukungan dari perusahaan local dalam berkontribusi membangun daerah melalui pemberdayaan UMKM.</p>
--	--	--	--	---

Penelitian pertama diteliti oleh Reindra Prastiwa Melania pada tahun 2021 berjudul Efektivitas Jaring Pengaman Ekonomi Dampak Covid-19 bagi Usaha Mikro Makanan dan Minuman Olahan Kota Salatiga. Latar belakang dari penelitian ini adalah upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan Pandemi Covid-19 yang memperlambat perekonomian. Pelaksanaan program ini harus terus dievaluasi oleh masyarakat agar dapat berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, Reindra Prastiwa Melania melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemberian Jaringan Pengaman Ekonomi (JPE) di Kota Salatiga. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan *ordinary least square*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program JPE memiliki pengaruh signifikan positif sehingga layak untuk dipertahankan dan dikembangkan (Melania *et al* 2021: 242).

Penelitian kedua diteliti oleh Euis Hasmita Puti pada tahun 2017 berjudul Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda (Studi pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya UMKM untuk pertumbuhan ekonomi nasional sehingga pelaksanaan program pengembangan UMKM perlu diperhatikan. Peneliti melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan program pengembangan UMKM di Kota Samarinda. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda memiliki peran penting dalam pelatihan, pemberdayaan, pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan kepada para pelaku UMKM. Faktor penghambat program adalah

minimnya dana pelatihan, sumber daya manusia yang belum mumpuni, serta kemampuan manajemen yang terbatas (Putri 2017: 5431).

Penelitian ketiga diteliti oleh I Gusti Agung Alit Semara Putra pada tahun 2013 berjudul Efektivitas dan Dampak Program Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Pendapatan dan Kesempatan Kerja Usha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh reformasi dari krisis ekonomi 1997 menghasilkan kebijakan KUR yang diupayakan mampu mengatasi permasalahan permodalan sehingga peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui efektivitas dan dampak KUR terhadap Pendapatan dan Kesempatan Kerja UMKM di Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan perhitungan statistik non parametrik Mc Nemar. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa program bantuan KUR berdampak positif terhadap pendapatan dan kesempatan kerja UMKM di Kota Denpasar (Putra dan Saskara 2013: 457).

Penelitian keempat diteliti oleh Selfiawaty Fausiah pada tahun 2016 yang berjudul Efektivitas Pembinaan Usaha Industri Kecil Olahan Pangan oleh Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi (Studi di Kecamatan Sigi Biromaru). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran Dinas Koperasi UMIKM Perindustrian dan Perdagangan memiliki peran untuk melakukan pembinaan kepada usaha industri kecil sehingga diperlukan pengkajian terkait efektivitas program ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pembinaan usaha industri kecil olahan pangan yang dilakukan melalui program pengembangan layanan, pelibatan

masyarakat untuk mendorong kemampuan usaha, dan penciptaan kolaborasi belum berjalan dengan efektif (Fausiah 2016: 68).

Penelitian kelima diteliti oleh Ita Rosita pada tahun 2020 yang berjudul Efektivitas Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Dinas Koperasi dan UMKM memiliki fungsi untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM di Kota Dumai agar bisa lebih baik dan mampu mendukung perekonomian daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program pemberdayaan UMKM pada Kecamatan Sungai Sembilan di Kota Dumai dan menganalisis dampak program terhadap peningkatan pendapatan UMKM. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasilnya adalah program ini berjalan secara efektif pada lima indikator efektivitas, yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan (Rosita 2020: 109).

Penelitian terdahulu memiliki kegunaan untuk menambah wawasan peneliti guna memperkuat penelitian. Penelitian yang dilakukan peneliti memiliki kemiripan dengan penelitian kedua, keempat dan kelima. Persamaannya terlihat dari metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan pengambilan sampel melalui *purposive sampling*. Kemudian, persamaan lainnya yaitu fokus kepada bantuan pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat, khususnya pengembangan perekonomian oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Penelitian ini memperkuat asumsi penelitian kelima, bahwa efektivitas mampu diukur dengan indikator pencapaian tujuan, efisiensi, kepuasan kelompok sasaran, dan daya tanggap *client*. Kemudian, Penelitian ini memperkuat temuan

penelitian ketiga, yakni bantuan dari pemerintah mampu meningkatkan pendapatan pelaku UKM. Sama halnya seperti penelitian ini, ditemukan bahwa Bantuan Produktif Usaha Mikro di Sentra UKM Kota Lama Semarang meningkatkan omzet pelaku usaha.

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa efektivitas program dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Teknik *purposive sampling* dapat menjadi alternatif penentuan informan penelitian. Selain itu, setiap penelitian terdahulu memiliki kontribusi masing-masing pada penelitian ini. Penelitian pertama, berkontribusi dengan mendukung latar belakang tentang pentingnya diberlakukan bantuan produktivitas usaha mikro untuk menangani permasalahan ekonomi akibat pandemi. Penelitian kedua berkontribusi memberikan pandangan kepada peneliti terkait indikator efektivitas yang digunakan oleh peneliti nantinya. Penelitian ketiga membantu memperkuat tujuan bantuan produktivitas usaha mikro dan memberikan pandangan tentang bagaimana menganalisis efektivitas suatu kebijakan. Penelitian keempat membantu peneliti memperkuat pentingnya peran pemerintah dalam memberdayakan usaha mikro. Terakhir, penelitian kelima memberikan pandangan kepada peneliti tentang bagaimana menganalisis efektivitas kebijakan melalui pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan.

1.5.2. Kajian Teori

1.5.2.1. Kebijakan Sektor Publik

Menurut Friedrich yang dikutip oleh Winarno dalam bukunya *Teori dan Proses Kebijakan Publik* sebagai suatu arah tindakan yang di usulkan Oleh seseorang, sekelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesepakatan-kesepakatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai tujuan (Winarno 2008: 16). Menurut Anderson yang dikutip oleh Winarno dalam bukunya *Teori dan Proses Kebijakan Publik* (2002) yaitu kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan (Winarno 2008: 12). Menurut W. I. Jenkins dalam kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang diambil sekelompok aktor politik berkenaan dengan pencapaian tujuan yang telah dipilih dan diputuskan bersama-sama dalam batas kewenangan kekuasaan dari aktor-aktor tersebut (Abdoellah dan Rusfiana 2016: 17). Menurut Kuypers, kebijakan publik tersusun atas tiga hal, yaitu tujuan yang dipilih oleh aktor-aktor untuk kebaikan bersama, cara dan sarana yang dipilih untuk memperoleh, serta rentan waktu yang dipilih untuk mencapai tujuan (Abdoellah dan Rusfiana 2016: 19).

Pendapat di atas secara eksplisit dapat ditarik kesimpulan dalam pernyataan kebijakan yang menegaskan bahwa kebijakan itu adalah suatu tindakan yang diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu.

1.5.2.2. Efektivitas Kebijakan

Efektivitas memiliki berbagai definisi dari para ahli. F. Drucker dalam Sugiyono menjelaskan bahwa efektivitas merupakan dasar untuk mencapai kesuksesan (Sugiyono 2010: 23). Fremont E. Kas dalam Sugiyono menuturkan bahwa efektivitas terjadi apabila telah memenuhi derajat indikator baik secara eksplisit maupun implisit untuk mencapai tujuan (Sugiyono 2010: 23). Gie mendefinisikan efektivitas merupakan kondisi terjadinya akibat dari suatu hal yang dikehendaki (Gie, 2006: 149). Suatu program dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuant dengan alat yang telah ditetapkan (Handoko 2008: 7). Efektivitas berhubungan dengan keadaan sebab akibat yang dipandang menjadi variabel lain (Pasolong, 2012: 51). Menurut Keban Efektivitas berkaitan dengan sumber daya manusia atau organisasi yang mencapai visi, misi, dan nilai yang telah disepakati bersama (Pasolong 2012: 51). Pada konteks perilaku organisasi, efektivitas memberikan hubungan antar produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan, serta pengembangan (Gibson 2011: 28). Pencapaian tujuan yang dimaksud diciptakan oleh suatu sistem dengan sumber daya dan sarana prasarana tertentu tanpa memberikan ketidakberdayaan yang tidak wajar pada implementasinya (Steers 2008: 87 Efektivitas berproses dalam rentang jangka pendek dan jangka panjang seperti mencerminkan konsistensi strategi, minat mengevaluasi, dan siklus organisasi. Efektivitas dibentuk oleh produk akhir yang tercapai pada suatu program organisasi ditinjau dari segi kualitas hasil kerja, kuantitas, dan batas waktu yang di targetkan.

Kebijakan dikatakan berhasil apabila telah memenuhi efektivitasnya. Efektivitas kebijakan dapat dijelaskan melalui proses, maksudnya keberhasilan kebijakan dapat ditentukan atau dipengaruhi oleh proses kebijakan itu sendiri. Proses kebijakan adalah rangkaian kegiatan dalam menyiapkan, menentukan, melaksanakan, dan mengendalikan suatu kebijakan. Rangkaian ini membentuk siklus kebijakan. Efektivitas kebijakan publik ditentukan melalui langkah pertama proses perumusan kebijakan, kedua proses implementasi, ketiga proses evaluasinya yang mana ketiga proses ini memiliki hubungan kausal dan siklikal.

Guna mengetahui suatu kebijakan efektif atau tidak, diperlukan perbandingan rencana yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai. Perbandingan tersebut dapat dilihat dengan menganalisis indikator efektivitas. Makmur (2010: 7) delapan indikator efektivitas sebagai berikut:

1. Ketepatan penentuan waktu

Waktu yang digunakan suatu organisasi mencapai tujuan dapat mempengaruhi tingkat efektivitas program.

2. Ketepatan perhitungan biaya

Perhitungan biaya diperlukan agar saat merealisasikan program tidak mengalami kekurangan baik dana dan sarana sampai program selesai dilaksanakan.

3. Ketepatan dalam pengukuran

Standarisasi dapat membantu pencapaian program agar berjalan secara lebih terarah.

4. Ketepatan dalam menentukan pilihan

Penentuan pilihan dihadapi saat melaksanakan program, pengambilan keputusan pada pilihan ini menjadi indikator penting keberhasilan program.

5. Ketepatan berpikir

Efektivitas dapat terjadi apabila organisasi melakukan strategi yang baik dengan ketepatan berpikir.

6. Ketepatan melakukan perintah

Organisasi mempunyai kemampuan untuk memberikan pengarahan dan perintah yang jelas dalam melaksanakan programnya untuk mencapai tujuan.

7. Ketepatan menentukan tujuan

Diperlukan penentuan tujuan yang tepat untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

8. Ketepatan sasaran

Sasaran yang dituju harus ditetapkan terlebih dahulu agar dapat menentukan keberhasilan organisasi mencapai tujuan.

Pengukuran efektivitas menurut Hari Lubis dan Martini Huseini menggunakan tiga pendekatan pengukuran, yaitu pendekatan sumber, pendekatan proses, dan pendekatan sasaran (Lubis dan Huseini 2009: 55) Penjelasan tiga pendekatan tersebut ialah sebagai berikut:

1. Pendekatan Sumber

Pendekatan sumber dilakukan dengan mengutamakan adanya keberhasilan suatu organisasi guna memperoleh sumber daya,

baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pendekatan ini didasari pada teori keterbukaan sistem atau lembaga terhadap lingkungan karena lembaga memiliki hubungan yang merata dengan lingkungannya. Sumber merupakan input sedangkan hasil adalah *output*, *input* ini umumnya bersifat langka dan bernilai tinggi.

2. Pendekatan proses

Efektivitas pelaksanaan program melalui proses internal ataupun mekanisme organisasi. Pendekatan proses menganggap efektivitas sebagai efisiensi dari suatu lembaga. Lembaga yang efektif dapat memproses kegiatan dengan lancar secara terkoordinasi.

3. Pendekatan Sasaran

Pendekatan sasaran berfokus pada hasil yang diberikan. Berkenanan tentang pengukuran sejauh mana organisasi berhasil direalisasikan dengan melihat sasaran resmi.

Nakamura dan Smallwood (1980:146) memberikan indikator efektivitas dengan mengacu pada lima hal sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan adalah suatu yang mutlak bagi keberhasilan suatu pelaksanaan kegiatan. merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan dengan menggunakan perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya

untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan.

2. Efisiensi

Memberikan penilaian terhadap kualitas kinerja yang dilaksanakan sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Efisiensi adalah suatu langkah yang diambil untuk menjaga keseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang digunakan dengan jumlah produksi yang dihasilkan (Yudith, 2016).

Menurut Syamsi (2007:50) indikator efisiensi kerja adalah sebagai berikut: (1) Latar Belakang dan Tujuan Pekerjaan, Mengerti latar belakang dan tujuan dari pekerjaan yang dilakukan. (2) Perencanaan, Membuat perencanaan pekerjaan termasuk berapa lama waktu yang ditargetkan. (3) Pemanfaatan Sumber Daya, Pembagian pekerjaan-pekerjaan besar menjadi pekerjaan-pekerjaan kecil. (4) Kemampuan, Kenali kemampuan diri dan jangan malu belajar dari orang lain. (5) Semangat Kerja, Semangat pantang menyerah dan saling menguatkan (Tessalonika, 2021).

3. Kepuasan kelompok sasaran

Dapat dilihat dengan mengkaji dampak secara langsung dari program yang dilaksanakan. Aspek ini sangat menentukan bagi keikutsertaan dan respon warga masyarakat dalam mengimplementasikan dan mengelola hasil-hasil program

tersebut. Tanpa adanya kepuasan dari pihak sasaran kebijakan, maka program tersebut dianggap belum berhasil.

4. Daya tanggap *client*

Aspek ini berkaitan dengan bagaimana daya tanggap kelompok sasaran terhadap program yang diberikan. Dengan adanya daya tanggap yang positif dari masyarakat (dalam hal ini masyarakat atau kelompok sasaran) maka dapat dipastikan peran serta mereka pada kebijakan dapat meningkat. Masyarakat dapat mempunyai perasaan ikut memiliki terhadap kebijakan dan keberhasilan pelaksana. Ini berarti kebijakan mudah diimplementasikan.

5. Sistem pemeliharaan

Terlihat dari adanya instansi yang stabil dan berkelanjutan mengelola program. Tanpa adanya sistem pemeliharaan yang memadai dan kontinue maka betapapun baiknya hasil program dapat berhenti ketika bentuk nyata hasil dari program tersebut mulai pudar. Kunci dalam sistem pemeliharaan ini adalah konsistennya instansi dalam pemeliharaan yang stabil dan berkelanjutan sehingga program tetap eksis.

Menurut Riant Nugroho, terdapat istilah lima tepat yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan kebijakan (Nugroho 2012: 30), yaitu:

a. Tepat kebijakan

Ketepatan kebijakan dilihat dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang dapat dipecahkan. Sisi kedua kebijakan adalah apakah kebijakan sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Sisi ketiga yaitu kebijakan dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan sesuai dengan karakter kebijakannya.

b. Tepat pelaksanaan

Pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh tiga lembaga yang berperan menjadi implementator yaitu pemerintah, kerjasama antar pemerintah dan masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang bersifat monopoli.

c. Tepat target

Ketepatan target dilihat dengan mengintervensi apakah target sudah sesuai dengan yang direncanakan, tidak tumpang tindih dengan kebijakan lain. Selain itu, juga melihat apakah implementasi kebijakan bersifat baru atau mampu memperbaiki implementasi kebijakan sebelumnya.

d. Tepat lingkungan

Lingkungan dalam hal ini dibagi menjadi lingkungan internal yang berinteraksi antar perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan

dengan lembaga yang terkait. Lingkungan eksternal berkaitan dengan persepsi publik terhadap kebijakan dan implementasinya.

e. Tepat proses

Tepat proses memiliki tiga proses yaitu *policy acceptance* dimana publik memahami kebijakan sebagai aturan dan pemerintah memahami perannya sebagai pelaksana tugas. *Policy adoption*, publik menerima kebijakan sebagai aturan dan pemerintah menerima aturan tersebut sehingga harus melaksanakannya. Selanjutnya, *strategic readiness* dilihat dari publik siap menjalankan dan menjadi bagian dari kebijakan serta pemerintah mampu melaksanakannya.

Riant juga menambahkan bahwa kelima tepat tersebut perlu didukung oleh tiga jenis dukungan, yaitu dukungan politik, dukungan strategis, dan dukungan teknis.

Berdasarkan berbagai teori efektivitas di atas, peneliti menggunakan teori efektivitas menurut Nakamura dan Smallwood yang menyatakan bahwa efektivitas dapat dianalisis menggunakan lima indikator, yaitu pencapaian tujuan, efisiensi, kepuasan kelompok sasaran, daya tanggap *client*, dan sistem pemeliharaan. Teori tersebut dipilih karena relevan dan memiliki cakupan yang luas. Pencapaian tujuan digunakan karena dapat mempertegas pengukuran efektif dilihat dari sudut pandang normatif dan keadaan di lapangan. Efisiensi Nakamura dan Smallwood bukan hanya berkaitan dengan biaya tetapi juga kualitas perencanaan dan pemanfaatan sumber daya yang digunakan. Teori ini lebih tepat digunakan untuk program yang berkaitan dengan bantuan kelompok sasaran sebagai partisipator sehingga penting untuk mengetahui kepuasan kelompok sasaran dan daya tanggap *client* untuk

melihat keikutsertaan kelompok sasaran. Selain itu, sistem pemeliharaan juga penting untuk dianalisis karena tanpa adanya sistem pemeliharaan yang memadai dan kontinuitas maka bentuk nyata dari suatu program berangsur-angsur menghilang.

1.5.2.3. Program Bantuan Produktif Usaha Mikro Tahun 2021

Program Bantuan Produktif Usaha Mikro adalah strategi dari pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional untuk membantu para pelaku usaha mikro agar dapat bertahan dan bangkit di tengah pandemi Covid-19. Tujuan normatif dari program ini adalah pelaku usaha mikro dapat menjalankan usaha di tengah krisis akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Permen 2021). Bantuan yang diberikan pemerintah pada tahun 2021 sebesar Rp 1.200.000,00. Subjek yang berhak menerima bantuan ini adalah Warga Negara Indonesia, memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro dari pengusul Bantuan Produktif Usaha Mikro, bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI/Polri, serta pegawai BUMN/BUMD, dan tidak sedang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR). Lembaga penyalur Bantuan Produktif Usaha Mikro adalah bank milik Badan Usaha Milik Negara, bank milik Badan Usaha Milik Daerah, dan PT. Pos Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bantuan Produktif Usaha Mikro berada dalam tanggung jawab Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM 2021).

1.6. Operasional Konsep

Efektivitas kebijakan adalah hasil proses kebijakan yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya dan alat melalui konsistensi strategi, kuantitas, kualitas, dan target waktu yang dapat mencapai tujuan kebijakan dihitung dari indikator efektivitas. Pada Program Bantuan Produktif Usaha Mikro, dikatakan efektif apabila telah menjadi tujuannya yaitu pelaku usaha mikro dapat menjalankan usaha di tengah krisis pandemi Covid-19. Efektivitas kebijakan erat kaitannya dengan sumber daya yang digunakan, meliputi peran birokrat sebagai pelaksana kebijakan itu sendiri sehingga indikator efektivitas kebijakan yang diambil pada penelitian ini adalah pencapaian tujuan, efisiensi, kepuasan kelompok sasaran, daya tanggap *client*, dan sistem pemeliharaan.

1. Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan adalah keberhasilan dari program Bantuan Produktif Usaha Mikro yang dijalankan oleh pemerintah. Dalam hal ini, pencapaian tujuan Bantuan Produktif Usaha Mikro terjadi apabila mencapai tujuan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021.

2. Efisiensi

Efisiensi program Bantuan Produktif Usaha Mikro dapat dilihat dari peran pemerintah mampu memahami latar belakang dan tujuan pekerjaan, perencanaan, pemanfaatan sumber daya, kemampuan, dan semangat kerja.

3. Kepuasan kelompok sasaran

Dilihat dengan mengkaji dampak yang dirasakan oleh penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro.

4. Daya tanggap *client*

Daya tanggap *client* dianalisis dengan melihat keikutsertaan penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro, pemahaman kelompok sasaran terkait program Bantuan Produktif Usaha Mikro, dan antusias penerima terhadap program Bantuan Produktif Usaha Mikro.

5. Sistem pemeliharaan

Sistem pemeliharaan dilihat dari peran pemerintah dalam melanjutkan program Bantuan Produktif Usaha Mikro (kontinuitas) dan pemeliharaan program Bantuan Produktif Usaha Mikro.

1.7. Metodologi Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah jenis pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara objektif yang berhubungan dengan Bantuan Produktif Usaha Mikro. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan fakta serta keterangan-keterangan yang ada di lapangan, sedangkan deskriptif ialah sifat data penelitian kualitatif yang wujud datanya berupa deskripsi objek penelitian yaitu kata-kata, gambar, dan angka-angka yang tidak dihasilkan melalui pengolahan statistika. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian

ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai efektivitas Bantuan Produktif Usaha Mikro di Sentra UKM Kota Lama Semarang.

1.7.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pusat perhatian guna mendapatkan data untuk dikumpulkan, diolah, dianalisis, diinterpretasikan sesuai dengan masalah yang ada dengan batasan-batasan tersebut. Fokus penelitian mempunyai peranan penting dalam suatu penelitian, yaitu dijadikan sarana untuk memandu dan mengarahkan penelitian. Dengan arahan fokus penelitian, peneliti mengetahui data mana yang dibutuhkan dan perlu diupayakan pengumpulannya. Penelitian berfokus pada keefektivitasan program kebijakan pemerintah yang diberikan pada UMKM, dilihat dari *output* yang dihasilkan. *Output* tersebut berupa peningkatan produktivitas UMKM sehingga dapat memberikan suntikan pada pertumbuhan ekonomi dan mencapai pemulihan ekonomi nasional.

1.7.3. Informan Penelitian

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* ialah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan informan terpilih dianggap paling tahu tentang objek yang diteliti. Melalui teknik *purposive sampling* diperoleh informan utama yaitu Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Kewirausahaan Dinas Koperasi UM Kota Semarang selaku pengurus Bantuan Produktif Usaha Mikro 2021 dan 30 persen pelaku usaha yang menerima Bantuan Produktif Usaha Mikro di Sentra UKM Kota Lama Semarang. Jumlah penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro di Sentra UKM Kota Lama Semarang sendiri berjumlah 19 UKM, dengan begitu peneliti melakukan wawancara dengan 6 Informan dari lima jenis usaha. Berikut beberapa informan dalam penelitian ini :

Tabel 1.5. Informan Penelitian

No.	Nama	Keterangan
1	Ibu Yuanita Rani Widasari, S.STP	Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Kewirausahaan
2	Ibu Widji Pangastuti	Pelaku UKM “De Widji” (<i>Fashion</i>)
3	Ibu Ernawati	Pelaku UKM “ <i>Brunch Handmade</i> (Kerajinan Tangan)
4	Ibu Lia	Pelaku UKM “Kum Kum” (Olahan Pangan)
5	Ibu Vony	Pelaku UKM “ <i>Vony Collection</i> ” (<i>Fashion</i>)
6	Ibu Ika	Pelaku UKM “Batik Sugma” (Batik)
7	Pak Rusdi	Pelaku UKM “Kedai Delapan-Delapan” (Lainnya)
8	Bapak Sudarmo	Ketua Paguyuban UKM Kota Lama Semarang

Sumber : Data Peneliti (2022)

1.7.4. Lokasi Penelitian

Adapun yang dimaksud dengan lokasi penelitian ini adalah tempat atau lokasi dimana peneliti memperoleh data atau informasi terkait dengan permasalahan penelitian. Lokasi dalam penelitian ini adalah Dinas Koperasi dan UM Kota Semarang yang berada di Jalan Pemuda No. 214 Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang dan Sentra UKM Kota Lama Semarang yang berada di Jalan Letjen Suprpto No. 31 Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.

1.7.5. Sumber Data

Sumber data adalah yang memungkinkan untuk diperoleh segala bentuk informasi. Baik itu berupa data maupun lisan tentang beberapa hal yang menjadi pusat perhatian. Menurut Lofland dalam Moleong sumber data dalam penelitian

kualitatif dalam kata-kata dan tindakan, selebihnya data-data tambahan dokumen, foto, dan lain-lainnya (Moleong 2013: 157):

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber yang dapat memberikan informasi, fakta dan gambaran suatu peristiwa yang diinginkan dalam penelitian. Pencatatan sumber data primer melalui wawancara atau pengamatan berperan serta dari gabungan kegiatan melihat, mendengar dan bertanya. Sumber data yang diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara yang terkait dengan pembahasan mengenai Efektivitas Program Bantuan Produktif Mikro Tahun 2021 di Sentra UKM Kota Lama Semarang.

2. Sumber data sekunder

Rukaesih Maolani (2015: 185) berpendapat bahwa sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak secara langsung melihat objek atau kejadian, tetapi dapat memberi informasi dan gambaran tentang efektivitas Bantuan Produktif Usaha Mikro. Data sekunder dalam penelitian ini berupa informasi dari Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan informan. Agar pemilihan sumber data sesuai dengan acuan teori dan pertanyaan penelitian maka pengambilan data dilakukan dengan mengikuti kaidah wawancara yang baik serta pertanyaan yang diberikan mengarah pada topik penelitian dan acuan teori yang dipergunakan dalam penelitian ini.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono 2016: 193). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi dan observasi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan ada dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu Esterberg dalam (Sugiyono 2016: 275). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang diperoleh. Oleh karena itu, peneliti menyiapkan instrumen pertanyaan dalam melakukan wawancara.

2. Observasi

Muhammad Ali dalam Mahmud (2017:115) menjelaskan, observasi dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek, baik secara langsung maupun tidak langsung. Peneliti menggunakan teknik wawancara berstruktur karena menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

3. Dokumentasi

Menurut Sedarmayanti dalam Mahmud (2017:113) dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis

yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa dan berguna bagi sumber data, bukti, informasi, kealiamahan yang sukar diperoleh, sukar ditemukan dan membuat kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

1.7.7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Apabila jawaban dari informan belum dapat dianalisis, peneliti akan melanjutkan pertanyaan sampai mendapatkan data yang kredibel. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman dan Saldana dengan langkah-langkah sebagai berikut (Miles, Huberman 2014: 14):

a) Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses pengadaan data untuk keperluan penelitian, maka mustahil peneliti dapat menghasilkan temuan apabila tidak memperoleh data.

b) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan pada hal penting, mencari tema, dan polanya sehingga data yang telah direduksi mampu memberikan gambaran yang lebih jelas. Selain itu, reduksi data mampu mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data lanjutan.

c) Penyajian Data (*Data display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flow chart* dan sejenisnya. Akan tetapi, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah diteliti.

d) Penarikan kesimpulan/verifikasi (*Conclusion Drawing/verification*)

Teknik analisis data kualitatif yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014: 92), kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat maka diperlukan penelitian lanjutan tetapi apabila pada penelitian awal sudah mendapatkan data yang sesuai dan mampu disimpulkan maka hasil penelitian bersifat kredibel.